



## Analysis of the Presentation of the Preparation of Financial Statements at the Bengkulu High Prosecutor's Office in 2022

### Analisis Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2022

Khoirul Anwar <sup>1)</sup>; Neri Susanti <sup>2)</sup>; Nenden Restu Hidayah <sup>3)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [iniirul13@gmail.com](mailto:iniirul13@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [nerisusanti@unived.ac.id](mailto:nerisusanti@unived.ac.id) ; <sup>3)</sup> [nenden@unived.ac.id](mailto:nenden@unived.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [10 Desember 2023]

Revised [09 Januari 2024]

Accepted [15 Januari 2024]

#### KEYWORDS

Laporan Keuangan,  
Analisis Penyajian Laporan  
Keuangan

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Setiap Satuan Kerja Instansi Pemerintah melaksanakan Akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada anggaran yang di kelola, hingga menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan menjalankan prinsip yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan pemerintahan, seperti prinsip kepatuhan, prinsip jumlah pasti, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan penuh, dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian laporan keuangan pada kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Pengumpulan data mengenai penyajian laporan dengan menggunakan deskriptif komparatif dalam bentuk studi kasus pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Penulisan menggunakan tehnik wawancara dan tehnik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 telah melakukan proses penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dan telah disajikan dan dipergunakan oleh kelompok pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini di harapkan memiliki dampak penting bagi Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam meningkatkan penyajian laporan keuangan.

#### ABSTRACT

Each Government Agency Work Unit carries out accounting for economic transactions that occur within the managed budget, to produce financial reports that provide information that is accurate, relevant, and can be understood by stakeholders, such as the general public, financial institutions, and other stakeholders, with implement the principles that must be applied in presenting government financial reports, such as the principle of compliance, the principle of exact amount, the principle of consistency, and the principle of full disclosure, guided by Government Accounting Standards. This study aims to analyze the conformity of financial reports at Bengkulu District Prosecutor's Office with Government Accounting Standards Number 71 of 2010. Collecting data regarding the presentation of reports using descriptive comparatives in the form of case studies at Bengkulu District Prosecutor's Office. Writing uses interview techniques and documentation techniques to collect the necessary data. The results of the research show that Bengkulu District Prosecutor's Office for Fiscal Year 2022 has carried out the process of presenting financial reports in accordance with Government Accounting Standards Number 71 of 2010 and has been presented and used by financial report user groups in decision making. This research is expected to have an important impact on the Bengkulu District Prosecutor's Office in improving the presentation of financial reports.

## PENDAHULUAN

Di dalam Pemerintah, di tuntutan mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan tata kelola pemerintahan yang di selenggarakan secara bersih, dan transparan sehingga memiliki kredibilitas, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, serta manfaat bagi masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan di gunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tersebut meliputi informasi yang di gunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang di anggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. (Mardiasmo. 2018:203).

Di Indonesia, akuntansi keuangan sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan, telah berkembang sangat pesat sejak adanya reformasi Manajemen Keuangan Negara. Reformasi tersebut di tandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pebendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-Undang ini mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel. (Mardiasmo. 2018:225). Mewujudkan Pemerintahan yang baik perlu

dipersiapkan informasi keuangan yang baik pula, dalam pembuatan Laporan Keuangan hendaknya didasari dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang handal, yang di gunakan dalam menghasilkan informasi keuangan Akuntabel untuk berbagai pihak yang di jadikan sebagai pendukung tercapainya tujuan Pemerintah, dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran serta di jadikan bahan dalam pengambilan keputusan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Lampiran I.02 PSAP 01- 1). Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), lembaga Kejaksaan berada pada posisi poros sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa, oleh karena itu, strategi penegakan hukum itu juga harus berorientasi kepada kualitas substantif, yang terukur dan transparan. Salah satu strategi itu dapat terwujud dengan pengelolaan anggaran secara tertib dan transparan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (CALK. 2022:5)

Laporan Keuangan merupakan kewajiban, disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga. Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku salah satu satuan kerja yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Standar Akuntansi Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Kementrian dan Lembaga. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan. Akuntansi sering disebut juga sebagai bahasa bisnis, semakin baik kita memahami bahasa bisnis maka semakin baik pula kita dapat mengelola suatu perusahaan. Proses Akuntansi dapat di gambarkan ilustrasi sebagai berikut pada gambar 1 (Suradi. 2009:2) :

Gambar 1 Proses Akuntansi



Persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi adalah sebuah persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara komponen-komponen dalam akuntansi yang disebut dengan akun misalnya aset (harta), liabilitas (kewajiban), ekuitas (modal). Jika dinyatakan secara matematis, persamaan neraca adalah sebagai berikut:  $Aset = Liabilitas + Ekuitas$ . (Prasetyo. 2020:14)

Kegunaan akuntansi secara umum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen.
2. Untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan.
3. Untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik pihak intern maupun ekstern.
4. Untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan.
5. Untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.



Publik atau sektor umum adalah bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dan mempengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik, atau suatu jalan. (Wikipedia).

Dengan demikian Akuntansi Sektor Publik dapat diberi definisi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang di jadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. (Majid. 2019:6)

Dalam pemerintahan sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintah yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang di lakukan pemerintah. (Maridiasmo. 2018:1).

### Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

(PSAP. 2010: Lampiran I.02 PSAP 01.6)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan meneliti Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2021 sehingga mendapatkan data penelitian yang kemudian akan di bandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sehingga dapat di ambil kesimpulan pelaksanaan dan permasalahan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut.

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara suatu teori yang berlaku dengan kenyataan yang di lapangan dan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang di teliti apa adanya secara tepat (Sugiono:2013). Dengan ini penulis akan menganalisis penyajian Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Metode Analisis penelitian ini dapat di jelaskan pada tabel 6 sebagaimana berikut:

**Tabel 1 Metode Analisis**

NO	Unsur- unsur Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintah No.77 Tahun 2010	Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Bengkulu TA 2022	Sesuai / Tidak Sesuai
1.	Laporan Realisasi Anggaran	1. Pendapatan 2. Belanja 3. Transfer 4. Pembiayaan		

2.	NERACA	1. Kas Dan Setara Kas 2. Investasi J. Pendek 3. Piutang Bukan Pajak 4. Persediaan 5. Investasi J. Panjang 6. Aset Tetap 7. Kewajiban J. Pendek 8. Kewajiban J. Panjang 9. Ekuitas		
3.	Laporan Operasional	1. Pendapatan-LO 2. Beban dari kegiatan operasional 3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional 4. Pos luar biasa 5. Surplus/defisit-LO		
4.	Laporan Perubahan Ekuitas	1. Ekuitas awal 2. Surplus/defisit-LO 3. Koreksi-koreksi 4. Ekuitas akhir		

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyajian Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2022

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan.

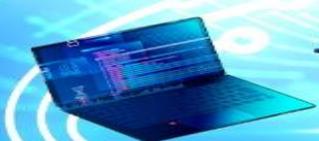
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Strategi peningkatan kinerja Kejaksaan tentunya tidak dapat dipisahkan dari situasi, kondisi dan tuntutan aspirasi demokrasi yang menghendaki "Hukum sebagai Panglima". Hal ini wajar adanya, karena seiring dengan maraknya tuntutan masyarakat untuk menciptakan komunitas masyarakat Madani (Civil Society) memerlukan adanya peningkatan pelayanan hukum dan penegakan hukum yang berkualitas.

Oleh karena itu, strategi penegakan hukum itu juga harus berorientasi kepada kualitas substantif, yang terukur dan transparan. Salah satu strategi itu dapat terwujud dengan pengelolaan anggaran secara tertib dan transparan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan Keuangan Wilayah Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kejaksaan Tinggi Bengkulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kejaksaan Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa :

### Realisasi Anggaran Belanja (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.9,079,497,996 berupa Pendapatan Pajak sebesar Rp.0, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.9,079,497,996 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp.0 atau mencapai 194.76 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp.4,662,009,000. Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.93,017,667,756 atau



mencapai 98.24 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.94,683,640,000. Laporan Realisasi Anggaran terdapat pada table 7 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran**

URAIAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>				
Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
Penerimaan Bukan Pajak	4,662,009,000	9,079,497,996	194.76	8,504,697,384
Penerimaan Hibah	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4,662,009,000</b>	<b>9,079,497,996</b>	<b>194.76</b>	<b>8,504,697,384</b>
<b>BELANJA</b>				
Belanja Pegawai	70,328,160,000	70,185,948,487	99.80	59,512,466,977
Belanja Barang	21,170,580,000	19,658,580,973	92.86	16,874,039,444
Belanja Modal	3,184,900,000	3,173,138,296	99.63	636,921,600
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>94,683,640,000</b>	<b>93,017,667,756</b>	<b>98.24</b>	<b>77,023,428,021</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(90,021,631,000)</b>	<b>(83,938,169,760)</b>		<b>(68,518,730,637)</b>

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9,079,497,996 dan Rp8,504,697,384. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 6.76 dari TA 2021 karena adanya pendapatan dan penjualan, pengelolaan BMN, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum dan, dari Pendapatan Denda serta dari Pendapatan Lain-lain Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak terdapat pada tabel 8 sebagai berikut :

**Tabel 3 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak**

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021	NAIK (TURUN)	%
Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya	17,185,949	6,745,555	10,440,394	154
Pend. dari pemindahtanganan BMN lainnya	39,899,998	3,555,000	36,344,998	1,022
Pend. dari penjualan peralatan dan mesin	183,614,456	47,507,747	136,106,709	286
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	65,107,447	64,478,790	628,657	0.97
Pendapatan ongkos perkara	18,327,000	22,431,000	(4,104,000)	(18.30)
Pendapatan penjualan barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan	756,160,542	310,760,719	445,399,823	143
Pendapatan Denda pelanggaran lalu lintas	1,044,621,900	1,217,350,500	(172,728,600)	(14.19)
Pendapatan Denda hasil tindak pidana lainnya	928,680,000	271,234,017	657,445,983	242
Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan	-	1,259,900,000	(1,259,900,000)	(100)
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Korupsi yang telah	4,338,948,073	3,715,402,102	623,545,971	16

diputuskan				
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	17,345,000	-	17,345,000	-
Pendapatan Denda hasil Tindak Pidana Korupsi	1,300,000,000	1,500,000,000	(200,000,000)	(13.33)
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana lainnya yang telah diputuskan Pengadilan	216,735,000	65,179,800	151,555,200	232
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	5,178,731	14,307,954	(9,129,223)	(64)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	23,160,500	4,000,000	19,160,500	479
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	88,180,400	-	88,180,400	-
Pendapatan Anggaran lain-lain	-	200	(200)	(100.0)
<b>Jumlah</b>	<b>9,079,497,996</b>	<b>8,504,697,384</b>	<b>574,800,612</b>	<b>6.76</b>

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp70,185,948,487 dan Rp59,512,466,977. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 17.95 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai, kenaikan grade tunjangan kinerja pegawai dan kenaikan tunjangan jabatan pegawai.

**Tabel 4 Perbandingan Belanja Pegawai**

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI T.A.2022</b>	<b>REALISASI T.A.2021</b>	<b>NAIK (TURUN)</b>	<b>%</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	19,352,132,604	16,761,297,120	2,590,835,484	15.46
Belanja Pembulatan Gaji PNS	338,379	269,307	69,072	25.6
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,182,378,590	1,158,115,670	24,262,920	2.10
Belanja Tunj. Anak PNS	380,189,797	375,278,418	4,911,379	1.31
Belanja Tunj. Struktural PNS	287,460,000	379,440,000	(91,980,000)	(24.24)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	12,076,550,000	11,242,840,000	833,710,000	7.42
Belanja Tunj. PPh PNS	735,601,789	754,639,358	(19,037,569)	(2.52)
Belanja Tunj. Beras PNS	1,089,848,580	1,018,876,980	70,971,600	6.97
Belanja Uang Makan PNS	3,716,150,000	3,070,683,000	645,467,000	21.0
Belanja Tunjangan Umum PNS	489,375,000	368,360,000	121,015,000	32.85
Belanja Uang Lembur	140,364,000	161,428,000	(21,064,000)	(13.05)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	30,735,608,811	24,241,400,856	6,494,207,955	26.7
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>70,185,997,550</b>	<b>59,532,628,709</b>	<b>10,653,368,841</b>	<b>17.9</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	10,049,063	35,661,732	(25,612,669)	(72)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>70,175,948,487</b>	<b>59,496,966,977</b>	<b>10,678,981,510</b>	<b>17.9</b>



Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19,658,580,973 dan Rp16,874,039,444. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan 16.50 % dari Realisasi TA 2021.

Hal ini antara lain disebabkan oleh maksimalnya penyerapan kebutuhan belanja barang terutama pada kegiatan pendukung teknis. Perbandingan Belanja Barang di sajikan pada tabel 10 sebagai berikut :

**Tabel 5 Perbandingan Belanja Barang**

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Barang Operasional	6,455,579,667	6,164,282,375	291,297,292	4.73
Belanja Barang Non Operasional	5,261,138,608	4,571,533,980	689,604,628	15.08
Belanja Barang Persediaan Barang	410,424,942	561,560,090	(151,135,148)	(26)
Belanja Jasa	2,091,752,019	1,457,574,018	634,178,001	43.51
Belanja Pemeliharaan	3,075,191,331	2,569,451,130	505,740,201	19.68
Belanja Perjalanan	2,369,330,806	1,558,651,351	810,679,455	52.01
<b>Belanja Kotor</b>	<b>19,663,417,373</b>	<b>16,883,052,944</b>	<b>2,780,364,429</b>	<b>16.47</b>
Pengembalian Belanja	4,836,400	9,013,500	(4,177,100)	(46)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>19,658,580,973</b>	<b>16,874,039,444</b>	<b>2,784,541,529</b>	<b>16.50</b>

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp3,173,138,296 dan Rp636,921,600. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 398.20 % dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh karena adanya alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari anggaran PNBPN yaitu pembuatan ruang barang bukti guna menunjang proses penanganan perkara. Perbandingan belanja modal di sajikan dalam tabel 11 sebagaimana berikut:

**Tabel 6 Perbandingan Belanja Modal**

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021	NAIK (TURUN)	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,681,365,296	225,329,600	2,456,035,696	1,089
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	491,773,000	411,592,000	80,181,000	19.48
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3,173,138,296</b>	<b>636,921,600</b>	<b>2,536,216,696</b>	<b>398.20</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3,173,138,296</b>	<b>636,921,600</b>	<b>2,536,216,696</b>	<b>398.20</b>

## 2.Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp.310,261,148,971 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.37,465,400,491.

Aset Tetap (neto) sebesar Rp.272,678,437,684 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.117,310,796. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.953,421,541 dan Rp.309,307,727,430. Uraian neraca pada tabel 13. Neraca pada tabel berikut :

**Tabel 7 Neraca**

URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Piutang Bukan Pajak	67,301,863,376	53,005,553,511
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(29,786,171,896)	(28,539,093,553)
Persediaan	898,197,500	309,485,000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>37,465,400,491</b>	<b>24,775,944,958</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	93,874,647,564	92,499,647,564

Peralatan dan Mesin	164,083,789,460	110,225,482,763
Gedung dan Bangunan	122,893,587,381	99,929,453,381
Jalan, Irigasi dan Jaringan	559,773,850	559,773,850
Aset Tetap Lainnya	248,532,200	248,532,200
Akumulasi Peny. Aset Tetap	(108,981,892,771)	(74,913,381,687)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>272,678,437,684</b>	<b>228,549,508,071</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tak Berwujud	49,400,000	42,900,000
Aset Lain-lain	3,553,902,945	3,717,814,819
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3,485,992,149)	(3,562,292,715)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>117,310,796</b>	<b>198,422,104</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>310,261,148,971</b>	<b>253,523,875,133</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang kepada Pihak Ketiga	953,421,541	1,795,049,965
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>953,421,541</b>	<b>1,795,049,965</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>953,421,541</b>	<b>1,795,049,965</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	309,307,727,430	251,728,825,168
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>309,307,727,430</b>	<b>251,728,825,168</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>310,261,148,971</b>	<b>253,523,875,133</b>

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp66,353,374,887 dan Rp53,005,553,511. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan pada tabel 14 sebagai berikut:

**Table 8 Piutang Bukan Pajak**

No	Uraian	2022	2021
1	Piutang Tilang Verstek	814,449,099	660,764,199
2	Piutang Uang Pengganti Perkara PIDSUS	65,451,195,422	51,190,448,460
3	Piutang Uang Pengganti Perkara DATUN	1,036,218,855	1,154,340,855
<b>Jumlah</b>		<b>67,301,863,376</b>	<b>53,005,553,514</b>

b. Penyisihan Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp29,786,171,896 dan Rp28,539,093,553. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan bukan pajak. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan tertuang pada tabel 15 adalah sebagai berikut :

**Tabel 9 Penyisihan Piutang Piutang Bukan Pajak**

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	19,536,232,235	0.01	97,681,161
Kurang Lancar	34,257,303,837	0.50	17,128,651,919
Diragukan	-	-	-
Macet	13,608,327,304	1.00	13,608,327,304
<b>Jumlah</b>	<b>67,401,863,376</b>	<b>-</b>	<b>29,786,171,896</b>

c. Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp898,197,500 dan Rp309,485,000. terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang



dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 tertuang pada tabel 16 sebagai berikut:

**Tabel 10 Persediaan**

JENIS	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Barang Konsumsi	53,091,500	11,463,000
Persediaan Lainnya	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	4,065,000	2,820,000
Tanah Bangunan untuk dijual atau iserahkan kepada Masyarakat	768,014,000	125,059,000
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	60,180,000	169,723,000
<b>Jumlah</b>	<b>885,350,500</b>	<b>309,065,000</b>

d.Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp93,874,647,564 dan Rp92,499,647,564. Nilai Tanah tersebut mengalami kenaikan karena hibah masuk pada Kejaksaan Negeri Mukomuko. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan pada table 17 sebagai berikut:

**Tabel 11 Mutasi nilai Tanah**

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	<b>92,499,647,564</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	1,375,000,000
<b>Mutasi kurang :</b>	
Koreksi Kesalahan input IP	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>93,874,647,564</b>

e.Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp164,083,789,460 dan Rp110,225,482,763. Nilai Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan pada table 18 sebagai berikut:

**Tabel 12 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin**

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	<b>110,225,482,763</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	2,679,765,296
Transfer Masuk	53,474,021,425
Hibah (Masuk)	462,147,037
Rampasan	7,000,000
Reklasifikasi Masuk	103,924,800
Perolehan Lainnya	17,500,000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Pencatatan	28,621,294
Transfer Keluar	1,413,594,090
Reklasifikasi Keluar	103,924,800
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	1,339,911,677
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>164,083,789,460</b>
Akumulasi Peny. s.d. 31 Desember 2022	(90,109,657,424)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>73,974,132,036</b>

f.Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp122,893,587,381 dan Rp99,929,453,381. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan di tuangkan pada table 19 sebagai berikut:

**Tabel 13 Mutasi nilai Gedung dan Bangunan**

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	<b>99,929,453,381</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	210,690,000
Hibah (Masuk)	5,833,966,000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	16,849,238,000
Pengembangan Nilai Aset	197,500,000
Reklasifikasi Masuk	198,954,692
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Pencatatan	126,990,000
Reklasifikasi Keluar	198,954,692
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	270,000
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>122,893,587,381</b>
Akumulasi Peny. s.d. 31 Desember 2022	(18,576,071,834)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>104,317,515,547</b>

## g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp559,773,850 dan Rp559,773,850. Tidak terjadi penambahan nilai.

## h. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.248,532,200 dan Rp.248,532,200. Tidak Terjadi pertambahan nilai.

## i. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp108,981,892,771 dan Rp74,913,381,687. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 tertuang pada table 20 sebagai berikut :

**Tabel 14 Mutasi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	164,083,789,460	(90,109,657,424)	73,974,132,036
2	Gedung dan Bangunan	122,893,587,381	(18,576,071,834)	104,317,515,547
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	559,773,850	(275,163,513)	284,610,337
4	Aset Tetap Lainnya	248,532,200	(21,000,000)	227,532,200
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>287,785,682,891</b>	<b>(108,981,892,771)</b>	<b>178,803,790,120</b>

## j. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp49,400,000 dan Rp42,900,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu berupa .

Mutasi Aset Tak Berwujud dapat di lihat pada table 21 sebagai berikut:

**Tabel 15 Mutasi nilai Aset Tak Berwujud**

<b>Saldo Nilai per 1 Januari 2022</b>	<b>42,900,000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Pembelian	6,500,000
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	-
<b>Saldo Nilai per 31 Desember 2022</b>	<b>49,400,000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(38,650,000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>10,750,000</b>

## k. Aset Lain-lain



Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp3,553,902,945 dan Rp3,717,814,819. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain di jelaskan pada table 22 sebagai berikut:

**Tabel 16 Mutasi nilai Aset Lain-lain**

<b>Saldo per 1 Januari 2022</b>	<b>3,717,814,819</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1,339,911,677
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Usulan Barang Rusak Berat	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>5,057,726,496</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	(3,447,342,149)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>1,610,384,347</b>

**l. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp3,485,992,149 dan Rp3,562,292,715. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 pada table 23 sebagai berikut :

**Tabel 17 Mutasi nilai Akumulasi Peny. dan Amortisasi Aset Lainnya**

<b>Aset Lainnya</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akum. Penyusutan/</b>	<b>Nilai Buku</b>
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Lain-lain	3,553,902,945	(3,447,342,149)	10,750,000
Aset Tak Berwujud	49,400,000	(38,650,000)	106,560,796
<b>Jumlah</b>	<b>3,603,302,945</b>	<b>(3,485,992,149)</b>	<b>117,310,796</b>
<b>Total</b>	<b>3,603,302,945</b>	<b>(3,485,992,149)</b>	<b>117,310,796</b>

**m. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp953,421,541 dan Rp1,795,049,965. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rinciannya dapat di lihat pada table 24 sebagai berikut :

**Tabel 18 Mutasi nilai Utang kepada Pihak Ketiga**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	232,797,013
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
<b>Total</b>	<b>232,797,013</b>

**n. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp309,307,727,430. dan Rp251,728,825,168. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**3. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.187.046.679.001,00 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp416.059.313.193,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp5.770.987.365.808,00. Kegiatan Non Operasional Defisit sebesar

Rp248.015.400.845,00 dan Pos-Pos Luar Biasa Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar 5,522,971,964,963,00. Laporan Operasional tergambar pada table 25 sebagai berikut :

**Tabel 19 Laporan Operasional**

Uraian	Kode	2022	2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	41,590,684,662	9,984,111,822
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>41,590,684,662</b>	<b>9,984,111,822</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.4	69,244,363,315	61,209,333,962
Beban Persediaan	D.5	359,379,090	1,034,787,243
Beban Barang dan Jasa	D.6	13,939,324,042	12,260,148,434
Beban Pemeliharaan	D.7	5,166,019,176	3,955,168,433
Beban Perjalanan Dinas	D.8	2,370,530,806	1,553,401,351
Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat	D.9	578,730,125	28,800,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.14	23,994,110,523	16,758,132,596
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.15	19,124,325,086	2,949,808,939
<b>Jumlah Beban</b>		<b>134,776,782,163</b>	<b>99,749,580,958</b>
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(93,186,097,501)	(89,765,469,136)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Penjualan Aset Non Lancar	D.17	218,564,454	51,062,747
Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.19	28,339,231	18,307,954
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		246,903,685	69,370,701
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(92,939,193,816)	(89,696,098,435)
Pos Luar Biasa	D.20		
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(92,939,193,816)</b>	<b>(89,696,098,435)</b>

a. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp41,590,684,662 dan Rp9,984,111,822. Dengan rincian pada table 26 sebagai berikut:

**Tabel 20 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN)
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	65,107,447	64,478,790	0.97
Pendapatan ongkos perkara	22,137,000	25,130,000	(11.91)
Pendapatan penjualan barang rampasan/hasil sitaan yang telah	756,160,542	310,760,719	143.33
Pendapatan Denda pelanggaran lalu lintas	1,478,256,900	1,479,868,500	(0.11)
Pendapatan Denda hasil tindak pidana lainnya	928,680,000	271,234,017	242.39
Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya	36,353,000	1,844,000	1,871.42
Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ ditetapkan		1,259,900,000	(100.00)
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan	35,492,507,299	4,819,158,241	636.49
Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	17,345,000	-	-
Pendapatan Denda hasil Tindak Pidana Korupsi	1,300,000,000	1,500,000,000	(13.33)
Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	88,180,400	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana lainnya yang telah diputuskan/ ditetapkan Pengadilan	216,735,000	65,179,800	232.52
Pendapatan Sitaan/Rampasan	1,172,036,125	179,812,000	551.81
<b>Jumlah</b>	<b>41,590,684,662</b>	<b>9,984,111,822</b>	<b>316.57</b>

a. Beban Pegawai



Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp69,244,363,315 dan Rp61,209,333,962.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13.13 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh bertambahnya pegawai dan adanya beban pegawai yang belum dibayar. Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dapat di lihat pada table 27 sebagai berikut :

**Tabel 21 Beban Pegawai**

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021	% (TURUN) NAIK
Beban Gaji Pokok PNS	19,348,545,452	16,764,883,920	15.41
Beban Pembulatan Gaji PNS	332,698	264,732	25.67
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,182,244,100	1,156,638,288	2.21
Beban Tunj. Anak PNS	380,127,073	375,195,114	1.31
Beban Tunj. Struktural PNS	287,460,000	378,534,850	(24.06)
Beban Tunj. Fungsional PNS	12,045,764,986	11,265,160,000	6.93
Beban Tunj. PPh PNS	720,366,563	769,396,476	(6.37)
Beban Tunj. Beras PNS	1,089,848,580	1,018,442,460	7.01
Beban Tunj. Lauk pauk PN	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	3,645,776,050	3,251,457,100	12.13
Beban Tunjangan Umum P	484,749,841	365,037,850	32.79
Beban Uang Lembur	140,364,000	161,428,000	(13.05)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	29,908,783,972	25,687,395,172	16.43
<b>Jumlah</b>	<b>69,234,363,315</b>	<b>61,193,833,962</b>	<b>13.13</b>

### Pembahasan

Pada umumnya Laporan Keuangan Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah dilaksanakan dengan baik, dapat diketahui bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Sub Bagian Keuangan selaku pengelolaan keuangan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu sudah sesuai, terlihat pada penyajian Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pada penyajian Laporan Keuangan terdapat unsur- unsur laporan keuangan yang digambarkan dalam tabel 40 sebagai berikut :

**Tabel 40. Perbandingan Unsur Laporan Standar Akuntansi Pemerintah No.71 Tahun 2010 Dengan Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Bengkulu 2022**

NO	Unsur-unsur Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintah No.77 Tahun 2010	Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2022	Sesuai / Tidak Sesuai
1.	Laporan Realisasi Anggaran	1. Pendapatan 2. Belanja 3. Transfer 4. Pembiayaan	1. Pendapatan 2. Belanja	Sesuai Sesuai Tidak ada Tidak ada
2.	NERACA	1.Kas Dan Setara Kas 2. Investasi J. Pendek 3. Piutang Bukan Pajak 4. Persediaan 5. Investasi J. Panjang 6. Aset Tetap 7. Kewajiban J. Pendek 8. Kewajiban J. Panjang 9. Ekuitas	1.Kas Dan Setara Kas 2. Investasi J. Pendek 3. Piutang Bukan Pajak 4. Persediaan 5. Investasi J. Panjang 6. Aset Tetap 7. Kewajiban J. Pendek 8. Kewajiban J. Panjang 9. Ekuitas	Sesuai Tidak ada Sesuai Sesuai Tidak ada Sesuai Sesuai Tidak ada Sesuai

3.	Laporan Operasional	1. Pendapatan-LO 2. Beban dari keg. operasional 3. Surplus dari Keg. Non Ops 4. Pos luar biasa 5. Surplus/defisit-LO	1. Pendapatan-LO 2. Beban dari keg. operasional 3. Surplus dari Keg. Non Ops 4. Pos luar biasa 5. Surplus/defisit-LO	Sesuai Sesuai Sesuai Tidak ada Sesuai
4.	Laporan Perubahan Ekuitas	1. Ekuitas awal 2. Surplus/defisit-LO 3. Koreksi-koreksi 4. Ekuitas akhir	1. Ekuitas awal 2. Surplus/defisit-LO 3. Koreksi-koreksi 4. Ekuitas akhir	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

### Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi pendapatan, dan belanja, Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak terdapat transaksi Transfer dan Pembiayaan, pendapatan bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Belanja diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Laporan realisasi anggaran Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai pembanding dengan tahun sekarang sehingga dapat dilihat terdapat kenaikan atau penurunan realisasi anggaran. menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, telah sesuai PSAP 01 paragraf 52.

### Neraca

Penyajian neraca diatur dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Neraca Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2022 telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 38 karena telah menggambarkan posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana.. Aset Kejaksaan Tinggi Bengkulu dikategorikan menjadi tiga yaitu aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Penyajian aset lancar yang meliputi piutang bukan pajak, penyisihan piutang dan persediaan. Aset tetap dalam neraca Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2022 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya. Menurut PSAP 01 paragraf 69 kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, namun pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu hanya terdapat kewajiban jangka pendek, diharapkan kewajiban jangka pendek dapat di selesaikan /dibayar dalam waktu dua belas bulan atau satu tahun setelah tanggal pelaporan. Pos terakhir dalam neraca pemerintah daerah adalah ekuitas dana. Sesuai dengan PSAP 01 paragraf 78 dijelaskan komponen dari pos ekuitas dana adalah ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Namun pada laporan neraca Kejaksaan Tinggi Bengkulu tahun 2022 hanya di sebutkan Ekuitas.

### Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih sedangkan Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak terdapat transaksi transfer dan pos-pos luar biasa. Menurut PSAP 01 paragraf 54 Laporan Operasional telah membandingkan dengan periode tahun yang lalu. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi berupa beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang diserahkan ke masyarakat, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih. Penyajian ini sudah sesuai dengan Menurut PSAP 01 paragraf 95.

### Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Kejaksaan Tinggi dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sehingga membantu dalam membentuk kebijakan keuangan dan melakukan perencanaan anggaran. telah menyajikan informasi ekuitas awal, kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, koreksi-koreksi yang



langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain penyesuaian nilai aset, koreksi nilai persediaan, koreksi aset tetap non revaluasi dan koreksi lain-lain telah sesuai PSAP 01 paragraf 101.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2022 telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu Tahun 2022 menggunakan basis akrual baik dari bab Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Di dalam penyajian Laporan Keuangan, Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam mempermudah penyajian Laporan Keuangan.
4. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 ada beberapa transaksi yang tidak terdapat di instansi Kejaksaan Tinggi Bengkulu seperti Pendapatan Pajak, Pendapatan Hibah, Belanja Pembiayaan Pinjaman.
5. Pada penjelasan Aset tidak menjelaskan rincian Aset baik lokasi Aset berada, Jumlah Aset dan kondisi Aset yang dimiliki apakah dalam kondisi baik atau sudah rusak.

### Saran

1. Tepat waktu sesuai dengan kalender pelaporan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi keterlambatan serta dalam menyajikan Laporan Keuangan tetap mengikuti aturan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Menyajikan informasi Aset yang lebih rinci menjelaskan lokasi dimana aset berada, jumlah dan harga perolehannya, dan menyebutkan kualitas kondisi barang apakah dalam kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, M. Syam kusufi. 2012. Teori, konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- Hantono dkk. 2020. Akuntansi Sektor Publik. Jawa Barat. Media Sains Indonesia.
- Haryanto, Sahmuddin, Ariffudin. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Majid, Jamaluddin. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Sulawesi Selatan. CV. Berkah Utami.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nordiawan, Deddi dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Salemba Empat.
- Prasetyo, Margo S. 2020. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Rusmana, Oman dkk. 2017. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Santi Hariyani, Diyah. 2016. Akuntansi Pengantar 1. Malang. Aditya Media Publishing.
- Suradi. 2009. Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: Gava Medika.
- Wikipedia. 2022. Pengertian Publik. 16 Oktober 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Publik>. 03 Januari 2023. pukul 09.01 wib.
- \_\_\_\_\_. 2010. Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- \_\_\_\_\_. 2021. Peraturan Jaksa Agung No. 22 Tahun 2021, tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kejaksaan.

- \_\_\_\_\_.2016. Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 222 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- \_\_\_\_\_.2021. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.